

## Krisis Keuangan 2008 dan Dampaknya Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia di Negara Konferensi Islam

Hilal Fathurrahman<sup>1\*</sup>, Mohammad Nur Rianto Al Arif<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Indonesia

Email: <sup>1</sup>hilal.fathurrahman@gmail.com, <sup>2</sup>nur.rianto@uinjkt.ac.id

<sup>\*)</sup>Penulis Korespondensi

---

### Keywords:

Financial crisis; human development index; OIC and Non OIC's Countries; difference in difference.

### *Abstract*

*This study aims to analyze effect that occurs between Financial Crisis 2008 on Human Development Index in OIC and Non-OIC countries for the period 2006-2021. This study used secondary data with stratified sampling method. Methods of data analysis using Difference in Difference (DiD). The results of processing with DiD show that only Balance of Payment is significant and positively affects the human development index in OIC and Non-OIC countries, while the variable rate of inflation, economic growth, population and unemployment rate are significant but negatively on the human development index. The results also showed that there was no effect between condition pre and post crisis on human development index for the period 2006-2021.*

### Kata Kunci:

krisis keuangan; indeks pembangunan manusia; negara OKI dan non-OKI; difference in difference

### *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara Krisis Keuangan 2008 terhadap Indeks Pembangunan Manusia di negara OKI dan Non-OKI tahun 2006-2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan pengambilan sampel menggunakan metode Stratified Sampling. Metode analisis data menggunakan Difference in Difference (DiD). Hasil olah data DiD menunjukkan Neraca Pembayaran yang signifikan dan positif berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di negara OKI dan Non OKI, sementara variabel tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, populasi dan tingkat pengangguran signifikan namun negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara kondisi sebelum dan sesudah krisis pada indeks pembangunan manusia periode 2006-2021.*

Received: 05 February 2022

Revised: 15 March 2022

Accepted: 05 April 2022

---

## PENDAHULUAN

Krisis keuangan bukanlah hal yang baru dalam perekonomian umat manusia, dan semuanya membuktikan bahwa krisis merusak kondisi perekonomian. Menurut Reihart dan Rogoff (2009) krisis tidak pernah ada yang baru sebab “*we have been here before*”. Drezner dan McNamara (2013) menyatakan pula krisis telah menyingkapkan dengan kejam peran keuangan dalam ekonomi global. Sugema (2012) menambahkan bahwa krisis juga telah berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan yang berujung pada munculnya masalah sosial pada masyarakat dan pemerintah.

10 tahun kemudian, perekonomian global kembali dihadapkan pada peristiwa krisis keuangan yang bersumber dari Amerika Serikat. Krisis keuangan 2008 ini bermula saat instansi keuangan seperti bank, perusahaan investasi dan perusahaan asuransi memberikan kredit yang amat longgar. Lembaga keuangan itu menawarkan penyediaan modal dalam bentuk kredit perumahan yang jaminannya adalah properti itu sendiri yang dikenal *prime-mortgage*. Lazimnya, pemberian kredit hanya diberikan pada nasabah yang berpenghasilan cukup, memiliki pekerjaan tetap, dan memiliki rekam jejak yang baik dalam pembayaran kredit sehingga diasumsikan mereka dapat mencicil dan melunasi kreditnya (Hamidi, 2012).

Kondisi akibat krisis keuangan 2008 ternyata semakin parah, menyebarluas dan tak terkendali karena tidak hanya dirasakan oleh Amerika Serikat sendiri. Lebih jauh dirasakan oleh bermacam negara di bagian dunia lain. Negara-negara Islam atau yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) ikut terdampak akibat krisis keuangan 2008. Kuwait yang merupakan negara dengan pendapatan tinggi, begitu terkena oleh hantaman krisis, pendapatan nasional perkapitanya menurun dari \$101.169 pada tahun 2007 menjadi \$96.470 pada tahun 2008 dan terus menuru menjadi \$85.010 pada tahun 2009. Hal yang sama terjadi pada Maldives sebagai negara menengah atas, sempat terjadi kenaikan pada tahun 2008 sebesar \$10780 dari tahun 2007 sebesar \$9600, namun kembali mengalami penurunan pada 2009 menjadi \$9960. Namun berbeda dengan Sudan sebagai kelompok negara menengah bawah yang mengalami kenaikan pada tahun 2008 menjadi \$3000 dari tahun 2007 sebesar \$2800, lalu kembali meningkat pada tahun 2009 menjadi \$3020.

Padahal pada saat yang sama pemerintah sedang melaksanakan upaya pembangunan demi tercapai negara yang maju, dan warganya yang bahagia. Implementasi dua hal tersebut akan tercapai dengan syarat dapat mencapai komponen-komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikonsentrasikan pada tiga aspek: pendidikan, pendapatan, serta kesehatan. Maka dengan adanya krisis keuangan, akan sangat berdampak pada pembangunan manusia itu sendiri. Fenomena pembangunan manusia di tengah krisis keuangan menarik untuk disimak dengan seksama, hal tersebut diperkuat oleh ungkapan oleh Peet (2015) bahwa pembangunan ditujukan untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik.

Negara-negara OKI sebagai bagian dari perekonomian dunia merupakan negara yang melakukan pembangunan itu. Perkembangan pembangunan manusia di negara OKI diuraikan pada Tabel 1. Tabel 1 menarik untuk disimak karena sekalipun terjadi krisis keuangan, nilai indeks pembangunan manusia rupanya terus mengalami tren positif setiap tahun. Seperti contoh di atas, Kuwait pada tahun 2007 menunjukkan nilai IPM sebesar 0.789 dan meningkat menjadi 0.790 pada 2008 lalu 0.792 pada 2009. Demikian juga dengan Maldives mencapai angka IPM 0.647 pada tahun 2007 meningkat menjadi 0.657 pada tahun 2008 dan lalu 0.658 pada 2009. Hal serupa juga terjadi pada Sudan pada tahun 2007 mencapai angka 0.452 lalu meningkat menjadi 0.464 pada tahun 2008 dan terus naik pada tahun 2009 menjadi 0.469.

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia OKI

No	Negara/Tahun	2007	2008	2009	Keterangan
1	Kuwait	0.789	0.790	0.792	
2	Brunei Darussalam	0.827	0.828	0.831	
3	Saudi Arabia	0.784	0.793	0.797	
4	Oman	0.764	0.782	0.789	
5	Bahrain	0.796	0.796	0.794	Negara Pendapatan Tinggi
6	Libya	0.754	0.759	0.757	
7	Malaysia	0.751	0.762	0.766	
8	Kazakhstan	0.758	0.758	0.762	
9	Turkey	0.709	0.714	0.721	
10	Mauritius	0.728	0.734	0.742	
11	Maldives	0.647	0.657	0.658	
12	Jordan	0.735	0.736	0.734	
13	Egypt, Arab Rep.	0.651	0.659	0.660	
14	Tunisia	0.701	0.708	0.710	Negara Pendapatan Menengah Atas
15	Albania	0.718	0.724	0.729	
16	Indonesia	0.644	0.648	0.659	
17	Morocco	0.596	0.603	0.609	
18	Guyana	0.627	0.630	0.633	
19	Nigeria	0.479	0.485	0.491	
20	Pakistan	0.511	0.513	0.520	
21	Sudan	0.452	0.464	0.469	
22	Zambia	0.492	0.507	0.521	
23	Cameroon	0.481	0.489	0.497	
24	Kyrgyz Republic	0.628	0.631	0.635	Negara Pendapatan Menengah Bawah
25	Senegal	0.448	0.458	0.462	
26	Bangladesh	0.521	0.524	0.535	
27	Benin	0.455	0.462	0.468	
28	Mali	0.367	0.39	0.398	
29	Guinea	0.393	0.4	0.4	
30	Uganda	0.459	0.47	0.477	

*Sumber: Human Development Report,*

Sebenarnya wacana mengenai pembangunan manusia dalam banyak perspektif telah banyak dikaji sebagai contoh oleh Yolanda (2017) melalui aspek inflasi yang menunjukkan bahwa faktor tersebut memiliki pengaruh signifikan karena dengan adanya faktor tersebut, masyarakat memiliki kesulitan dalam mengakses komponen utama pembangunan manusia. Selain itu Khodabakhshi (2014) mengkaji relasi antara PBD dan IPM yang memiliki pengaruh rendah dalam perwujudan komponen IPM. Sekalipun begitu, penelitian dari Akanbi, dkk (2014) justru menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi secara statistik positif

berhubungan dengan indeks pembangunan manusia di Nigeria.

Lebih lanjut menurut Arisman (2018) dalam penelitiannya tentang *Determinant Human Development Index in ASEAN* menjelaskan bahwa populasi dan pendapatan sangat berpengaruh terhadap IPM. Penelitian ini diperkuat oleh penelitian Sulistyowati, dkk (2017) karena pengeluaran rumah tangga memiliki pengaruh signifikan dalam perwujudan pembangunan manusia. Maka dari itu, dampak krisis keuangan yang membuat ekspor rendah, nilai tukar terdepresiasi, inflasi dan pengangguran meningkat membuat daya beli masyarakat menjadi tergerus.

Selain itu, Sulistyowati, dkk (2017) yang menyatakan pula bahwa selain pengeluaran rumah tangga, pengeluaran pemerintah juga sangat berpengaruh terhadap pencapaian komponen IPM. Hal ini selaras dengan penelitian Kusharjanto dan Donghun Kim (2011) yang menjelaskan bahwa peningkatan infrastruktur secara signifikan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Oleh karena pengeluaran pemerintah ini punya pengaruh besar terhadap IPM, penelitian Becherair (2017) memperkuat dengan menyatakan bahwa korupsi menyebabkan IPM secara tidak langsung melalui stabilitas politik dan kanal pengeluaran kesehatan.

Pengeluaran pemerintah memiliki posisi yang strategis dalam pencapaian komponen IPM. Secara lebih spesifik Paliova, dkk (2019) menjelaskan hal itu pengeluaran untuk pendidikan, sosial, dan GNI perkapita memengaruhi IPM dalam jangka panjang. Maka dari itu, perekonomian nasional sebisa mungkin secara fundamental harus dijaga sekuat tenaga, sebab seperti disampaikan oleh Albassam(2013) tingkat perkembangan suatu bangsa memengaruhi hubungan antara pemerintah dan pertumbuhan selama masa krisis secara berbeda.

Sementara itu, Kieu & Tien (2021) mencatat bahwa krisis keuangan berkorelasi negatif terhadap IPM jika dipasangkan dengan variabel Foreign Direct Investment (FDI). Penelitian tersebut menemukan bahwa krisis keuangan tahun 2008 berpengaruh terhadap turunnya aktivitas FDI karena sebagian besar negara melakukan kebijakan proteksionisme. Kebijakan proteksionisme meningkatkan tingkat pengangguran yang pada akhirnya berpengaruh terhadap angka indeks pembangunan manusia.

Meski demikian, penulis belum menemukan penelitian yang secara langsung membahas mengenai krisis keuangan serta dampaknya bagi pembangunan manusia apalagi secara spesifik membahas pengaruh krisis terhadap negara OKI. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut karena pembangunan manusia merupakan muara akhir dari sebuah aktivitas ekonomi. Sebuah kehidupan yang lebih baik bagi banyak orang masih berarti, secara esensial, memenuhi kebutuhan dasar, menemukan rasa aman, dan harga- harga yang terjangkau bagi semua orang.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, dalam menganalisis dan menginterpretasikan data yang dihasilkan oleh metode tersebut, peneliti melihatnya dalam bingkai Ilmu Ekonomi Pembangunan, suatu pendekatan yang

berdasarkan ketentuan-ketentuan ilmu ekonomi yang telah diformulasikan menjadi Indeks Pembangunan Manusia. Adapun evaluasi terhadap dampak kuantitatif sebelum dan sesudah dilakukan penelitian menggunakan metode *difference in difference*.

Populasi dalam penelitian ini adalah negara-negara yang ada di seluruh dunia dalam rentan waktu tahun 2000-2018, yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu: a) kelompok I adalah negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam sebagai kelompok perlakuan. Maka negara-negara yang menjadi objek penelitian sejumlah 57 negara, b) kelompok II adalah negara yang tidak tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam sebagai kelompok kontrol. Maka negara-negara yang menjadi objek penelitian sejumlah 209 negara.

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan menggunakan *Stratified Sampling*. Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara dalam US Dollar yang diklasifikasi pada negara pendapatan tinggi, negara pendapatan menengah atas, negara pendapatan menengah rendah, dan negara pendapatan rendah sesuai dengan *atlas world map* per tahun 2021. Negara-negara sampel penelitian diuraikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. PDB Per kapita Negara-negara Sampel Penelitian (dalam US Dollar)**

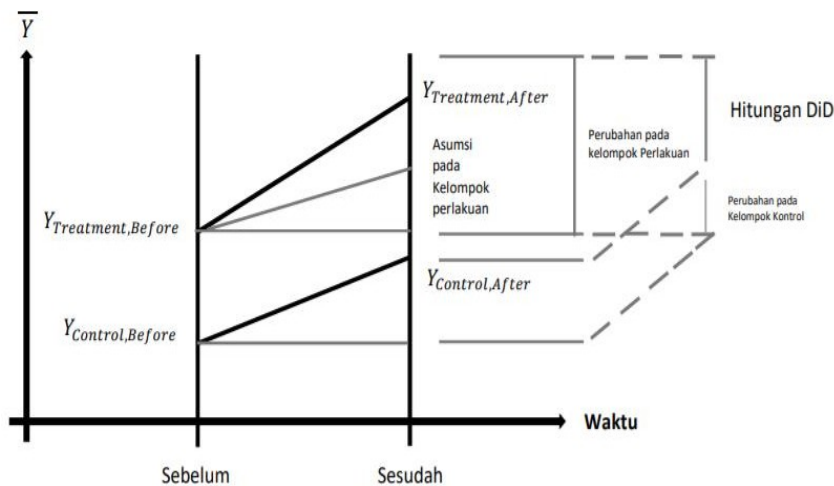
	OKI		Non-OKI	
	Negara	PDB Per kapita	Negara	PDB Per kapita
<b>Negara</b>	Kuwait	24300,3294	Singapura	72794,003
<b>Pendapatan</b>	Brunei	31449,0766	Norwegia	89154,2761
<b>Tinggi</b>	Saudi Arabia	23185,8708	Switzerland	91991,6005
	Oman	19509,4665	Amerika Serikat	70248,629
	Bahrain	26562,9691	Hongkong	49800,5424
	Turki	9661,23598	Belanda	57767,8788
			Swedia	61028,7381
			Austria	53637,7057
			Denmark	68007,7567
			Australia	60443,1092
<b>Negara</b>	Libya	6357,19555	Afrika Selatan	7055,04478
<b>Pendapatan</b>	Malaysia	11109,2618	St Lucia	9414,22623
<b>Menengah</b>	Kazakhstan	10373,7898	Kolombia	6104,13671
<b>Atas</b>	Mauritius	9106,2372	Dominika	7653,17187
	Maldives	10366,2934	Ekuador	5965,13287
	Jordan	4103,25897	Peru	6621,57434
	Albania	6492,87201	China	12556,3331
	Guyana	9998,54431	Paraguay	5891,49997
			Jamaica	5183,5813
<b>Negara</b>	Mesir	3698,83498	Vietnam	3756,48912
<b>Pendapatan</b>	Tunisia	3807,13915	Lesotho	1094,09818
<b>Menengah</b>	Indonesia	4332,70928	Ghana	2363,2993
<b>Bawah</b>	Maroko	3795,38013	Papua New Guinea	2672,94579

	Nigeria	2065,74907	Kamboja	1625,23502
	Pakistan	1505,01019	Kenya	2081,79985
	Kamerun	1666,93273	Tanzania	1099,2876
	Kyrgistan	1276,70037	Nepal	1208,21853
	Senegal	1636,89321	Haiti	1829,59304
	Bangladesh	2457,92488		
	Benin	1319,15499		
	Guinea	1189,176		
<b>Negara</b>	Sudan	751,82135	Kongo	577,209215
<b>Pendapatan</b>	Zambia	1137,34363		
<b>Rendah</b>	Mali	873,794862		
	Uganda	883,892032		

Sumber: Data World Bank, 2021

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan metode *Difference-in-Difference* dengan menggunakan aplikasi Eviews 9. Teknik analisis data ini mensyaratkan adanya dua periode waktu yaitu sebelum dan sesudah perlakuan (*treatment*). Penjelasan mengenai kondisi pra dan pasca diilustrasikan pada dua kelompok dan dua periode waktu. Asumsi kelompok perlakuan bersifat kontra dengan kelompok kontrol (Fredriksson & Oliveira, 2019). Secara lebih lanjut akan dijelaskan dalam ilustrasi gambar 1.

Gambar 1. Ilustrasi DiD



Dalam hal ini perlakuan, adalah terjadinya krisis keuangan global yang terjadi di Amerika pada tahun 2008. Selanjutnya, juga harus terdapat kelompok kontrol (Contoh: negara yang terkena krisis tetapi bukan bagian dari OKI), dan karakteristik kelompok perlakuan dan kelompok control harus serupa. Kerangka metode DiD ditunjukkan oleh persamaan 1.

$$y = \alpha + \beta_1.T + \beta_2.S + \beta_3(T.S) + \varepsilon \quad (1)$$

Berdasarkan persamaan di atas yaitu  $y$  adalah dampak (kenaikan atau penurunan) IPM. Selanjutnya  $T$  adalah dummy untuk variabel dalam satu periode, dan  $S$  adalah dummy

grup untuk variable-variabel yang sudah ditentukan. Adapun persamaan ( $T, S$ ) adalah dummy variable yang mengindikasikan ketika  $S = T = 1$ . Data disajikan dalam 3 penyajian: pertama,  $d\_krisis=0$  dan  $d\_perlakuan=1$  untuk menjelaskan kondisi sebelum dan sesudah terjadinya krisis ekonomi. Kedua,  $d\_krisis=1$  dan  $d\_perlakuan=0$  untuk menjelaskankondisi kelompok kontrol dan kelompok perlakuan saat terjadinya krisis.

Ketiga,  $d\_krisis=1$  dan  $d\_perlakuan=1$  untuk menjelaskan hanya kelompok perlakuan dan kondisinya setelah terjadi krisis ekonomi. Selisih perbedaan biasanya disingkat DiD atau DD adalah teknik statistik yang digunakan dalam ekonometri dan penelitian kuantitatif dalam ilmu-ilmu sosial yang mencoba untuk meniru desain penelitian eksperimental menggunakan data studi observasional, dengan mempelajari efek diferensial dari pengobatan pada 'kelompok perlakuan' versus 'kelompok kontrol' dalam percobaan alami. Ini menghitung efek pengobatan (yaitu, variabel penjelas atau variabel independen) dari hasil (yaitu, variabel respon atau tergantung variabel) dengan membandingkan rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dalam variabel hasil untuk kelompok perlakuan, dibandingkan dengan rata-rata perubahan dari waktu ke waktu untuk kelompok kontrol. Meskipun dimaksudkan untuk mengurangi dampak dari faktor-faktor luar dan bias seleksi, tergantung pada bagaimana kelompok perlakuan yang dipilih, metode ini mungkin masih dikenakan bias tertentu (mis berarti regresi, kausalitas terbalik dan dihilangkan variabel bias).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Organisasi Konferensi Islam (OKI)**

Organisasi Kerjasama Islam adalah organisasi antar pemerintah terbesar kedua setelah PBB dengan keanggotaan 57 negara yang tersebar di empat benua: Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Amerika Latin. Didirikan berdasarkan keputusan KTT bersejarah yang berlangsung di Rabat, Kerajaan Maroko pada 12 Rajab 1389 Hijriyah (25 September 1969) menyusul adanya pembakaran Mesjid Al Aqsa di Yerusalem. Maka dari itu, organisasi ini didirikan dalam rangka berusaha untuk melindungi kepentingan dunia Islam dengan semangat mempromosikan perdamaian dan harmoni internasional di antara berbagai orang yang ada di dunia.

Pada tahun 1970 merupakan pertemuan pertama dari Konferensi Islam Menteri Luarnegri (ICFM) yang diselenggarakan di Jeddah yang memutuskan untuk membentuk sekretarist permanen di Jeddah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Per tahun ini, Yousef Ahmed Al-Othaimen adalah Sekretaris Jenderal ke 11 yang pertama menjabat pada tahun 2016.

Program OKI-2025 tertuang dalam Piagam OKI dan berfokus pada 18 bidang prioritas dengan 107 tujuan. Bidang-bidang prioritas termasuk isu- isu perdamaian dan keamanan, Palestuna dan Al Quds, pengentasan kemiskinan, penanggulangan terorisme, investasi dan keuangan, keamanan pangan, sains dan teknologi, perubahan iklim, moderasi beragama, kebudayaan dan harmoni antar agama, pemberdayaan perempuan, aksi kemanusiaan Islam bersama, hak asasi manusia dan tata kelola yang baik.

### Hasil Empiris dan Analisis

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis dampak difference in difference (DiD). Pengujian ini berada pada tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0.05. Apabila nilai probabilitiy  $<0.05$  maka koefisien regresi signifikansi diterima, sedangkan apabila nilai probability  $>0.05$  maka koefisien regresi tidak signifikan. Adapun setelah diuji, menghasilkan perhitungan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Hasil Empiris**

Variabel	Koefisien	Prob
C	0.799926	0.0000
Neraca Pembayaran	0.004833	0.0000
Pertumbuhan Ekonomi	-0.003589	0.0000
Inflasi	-0.005138	0.0000
Pengangguran	-0.003560	0.0000
Populasi	-0.036195	0.0000
d_krisis=0 dan d_perlakuan=1	-0.052168	0.0000
d_krisis=1 dan d_perlakuan=0	0.043797	0.0000
d_krisis=1 dan d_perlakuan=1	0.017937	0.1078
R-Squared	0.366869	
Adjusted R-Squared	0.362379	

Berdasarkan hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa Neraca Pembayaran, pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran dan tingkat populasi memiliki signifikansi terhadap Indeks Pembangunan Manusia karena masing-masing memiliki nilai probabilitas 0.0000 atau  $<0.05$ . Namun di antara semua variabel yang digunakan, hanya neraca pembayaran yang memiliki pengaruh positif. Adapun variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan tingkat populasi memiliki pengaruh yang negatif.

Pembangunan berarti adanya pergerakan ke arah yang lebih baik, jika keadaan berubah pada yang lebih buruk maka tidak dapat disebut sebagai pembangunan (Peet, 2015). Pada tahun 1990 lahir sebuah teori oleh UNDP bernama Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) yang memiliki 3 dimensi: pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang secara sah digunakan oleh PBB sebagaimana dijelaskan oleh Todaro dan Smith (2012), yakni secara definisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berarti sebuah indeks yang mengukur pengembangan sosial-ekonomi yang didasarkan pada kombinasi dari pengukuran tingkat pendidikan, kesehatan, serta pendapatan perkapita. Adapun UNDP mendefinisikan IPM sebagai indeks gabungan yang mengukur rata-rata 3 dimensi pembangunan manusia: kehidupan yang sehat dibarengi umur panjang, berpengetahuan, dan memiliki standar hidup yang layak. (HDRs, 2011).

Pada versi pertama dari Indeks Pembangunan Manusia, UNDP mengukur dimensi



kesehatan dengan angka harapan hidup saat lahir. Adapun untuk mengukur dimensi pengetahuan dengan angka melek huruf dan kombinasi angka partisipasi kasar. Sedangkan untuk mengukur dimensistandar hidup layak melihat dari angka PDB perkapita (PPP US\$).

Perhitungan tersebut mengalami perubahan, UNDP merilis bahwa dalam versi terakhir dari Indeks Pembangunan Manusia digambarkan bahwa dimensi kesehatan diukur dari angka harapan hidup saat lahir dan indeks harapan hidup. Adapun dimensi pengetahuan diukur dari angka harapan lama bersekolah dan angka rata-rata sekolah. Sedangkan untuk mengukur dimensi standar hidup layak diukur dengan nilai PNB per kapita (PPP US\$).

Untuk setiap dimensi nilai indeks dihitung dalam skala 0-1 dimana 0 adalah minimum, dan 1 adalah maksimum (Sagar dan Najam, 1997). Dengan menggunakan 3 indikator pengukuran tersebut. Ranking HDI untuk negara-negara di dunia dibagi pada 4 grup: pertama, pembangunan manusia rendah (0.0-0.499); kedua, pembangunan manusia sedang (0.50 – 0.799); ketiga, pembangunan manusia tinggi (0.80 – 0.90); keempat, pembangunan manusia sangat tinggi (0.90 – 1.0) (Todaro & Smith, 2012).

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan nilai Adjusted  $R^2$  pada saat mengevaluasi model regresi terbaik. Dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel independen. Berdasarkan output diatas dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R- Squared sebesar 0.362379, hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel dependen Indeks Pembangunan Manusia secara simultan dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen neraca pembayaran, pertumbuhan ekonomi, tingkat Inflasi, Tingkat Pengangguran dan tingkat populasi sebesar 36.2%. Sedangkan sisanya sebesar 63.8% dijelaskan oleh varibel lain diluar variabel yang diteliti.

Setelah dibandingkan kondisi sebelum dan sesudah krisis atau (d\_perlakukan=0 dan d\_krisis=1) menghasilkan angka probabilitas 0.0000 yang berarti memiliki signifikansi namun nilai koefisiennya negatif (-0.052168). Selain itu, nilai untuk kelompok perlakuan (OKI) dan kelompok kontrol (Non-OKI) atau (d\_perlakukan=1 dan d\_krisis=0) memiliki pengaruh yang positif (0.43797) dan signifikan (0.0000<0.05). Namun untuk kelompok perlakuan (OKI) dan kondisinya setelah krisis atau (d\_Perlakukan=1 dan d\_Krisis=1) memiliki nilai probabilitas 0.1078 atau > 0.05 dengan nilai koefisien -0,017937 yang berarti krisis tidak menunjukkan pengaruh signifikan dan bersifat negatif terhadap Indeks Pembangunan manusia baik di negara OKI.

Dari hasil pengujian DiD untuk variabel neraca pembayaran adalah memiliki pengaruh terhadap IPM di negara OKI dan Non-OKI periode 2006-2021. Hal tersebut terbukti dengan nilai prob sebesar 0.0000 atau < 0.05 dan menjelaskan bahwa neraca pembayaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM periode 2006-2021 di negara OKI dan Non-OKI. Adapun nilai koefisien dari variabel neraca pembayaran sebesar 0.004833, yang berarti memiliki pengaruh positif sehingga setiap 1% peningkatan neraca pembayaran memungkinkan adanya peningkatan 0.48% dalam indeks pembangunan manusia. Sebagaimana dalam Case dan Fair (2007) menjelaskan bahwa neraca pembayaran sangat erat kaitanya dengan valuta asing, karena mencatat transaksi barang, jasa, aset

dengan negara lain. Jadi positif atau negatif neraca pembayaran bergantung pada produktivitas manusia yang ada di suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa untuk diperjualbelikan dengan negara lain.

Sementara itu, hasil pengujian DiD untuk variabel pertumbuhan ekonomi memiliki signifikansi terhadap IPM di negara OKI dan Non-OKI periode 2006-2021. Hal tersebut terbukti dengan nilai prob sebesar 0.0000 atau  $< 0.05$  dan menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki signifikansi terhadap IPM periode 2006-2021 di negara OKI dan Non-OKI. Adapun nilai koefisien dari variabel pertumbuhan ekonomi sebesar -0.003589, yang berarti memiliki pengaruh negatif sehingga setiap 1% peningkatan pertumbuhan ekonomi memungkinkan adanya penurunan 0.35% dalam indeks pembangunan manusia. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Paliova, dkk (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM. Selain itu Arisman (2018) menyimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan memiliki pengaruh terhadap tinggirendahnya Indeks Pembangunan Manusia. Dalam pada itu menjadi penting untuk terus meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi agar terjadi peningkatan nilai IPM. IPM merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan manusia dalam skala makro.

Untuk variabel tingkat inflasi, hasil pengujian DiD menunjukkan bahwa tingkat inflasi memiliki signifikansi terhadap IPM di negara OKI dan Non-OKI periode 2006-2021. Hal tersebut terbukti dengan nilai prob sebesar 0.0000 atau  $< 0.05$  menjelaskan bahwa tingkat inflasi memiliki signifikansi terhadap IPM periode 2000-2018 di negara OKI dan Non-OKI. Adapun nilai koefisien dari variabel tingkat inflasi ialah -0,005138, yang mana menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh negatif sehingga setiap 1% peningkatan inflasi akan mengurangi 0,51% pada indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yolanda (2017) mengungkapkan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, dan inflasi juga memiliki pengaruh positif dan secara signifikan berdampak terhadap kemiskinan di Indonesia. Tetapi penelitian lain seperti dalam Arisman (2018) justru menunjukkan sebaliknya bahwa tingkat inflasi tidak memiliki signifikansi dan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di ASEAN meskipun inflasi akan mengurangi daya beli masyarakat.

Dari hasil pengujian DiD untuk variabel tingkat pengangguran adalah memiliki signifikansi terhadap IPM di negara OKI dan Non-OKI periode 2006-2021. Hal tersebut terbukti dengan nilai prob sebesar 0.0000 atau  $< 0.05$  menjelaskan bahwa tingkat pengangguran memiliki signifikansi terhadap IPM periode 2006-2021 di negara OKI dan Non-OKI. Adapun nilai koefisien dari variabel tingkat pengangguran sebesar -0.00356 yang mana menjelaskan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh yang negatif sehingga setiap 1% peningkatan tingkat pengangguran akan menurunkan 0,35% pada indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan hasil pengujian DiD untuk variabel tingkat populasi adalah memiliki signifikansi terhadap IPM di negara OKI dan Non-OKI periode 2006-2021. Hal tersebut terbukti dengan nilai prob sebesar 0.0000 atau  $< 0.05$  dan menjelaskan bahwa tingkat

populasi memiliki signifikansi terhadap IPM periode 2006-2021 di negara OKI dan Non-OKI. Adapun nilai koefisien dari variabel tingkat populasi sebesar  $-0.036195$ , yang berarti memiliki pengaruh negatif sehingga setiap 1% peningkatan tingkat populasi memungkinkan adanya penurunan 0.36% dalam indeks pembangunan manusia.

Setelah dibandingkan kondisi sebelum dan sesudah krisis atau ( $d\_perlakukan=0$  dan  $d\_krisis=1$ ) menghasilkan angka probabilitas 0.0000 yang berarti krisis memiliki signifikansi namun nilai koefisiennya negatif ( $-0.052168$ ) terhadap Indeks Pembangunan Manusia periode 2006-2021. Pada konteks ini hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan kondisi antara sebelum dan sesudah krisis yang diwakili oleh variabel-variabel yang digunakan di atas.

Selain itu, nilai untuk kelompok perlakuan (OKI) dan kelompok kontrol (Non-OKI) atau ( $d\_perlakukan=1$  dan  $d\_krisis=0$ ) memiliki pengaruh yang positif ( $0.43797$ ) dan signifikan ( $0.0000 < 0.05$ ) terhadap Indeks Pembangunan Manusia periode 2006-2021. Hasil penelitian menyingkapkan bahwa kelompok negara-negara OKI terpengaruh positif secara signifikan apabila krisis hanya dialami oleh negara OKI dan tidak dialami oleh negara Non-OKI. Namun untuk kelompok perlakuan (OKI) dan kondisinya setelah krisis atau ( $d\_Perlakukan=1$  dan  $d\_Krisis=1$ ) memiliki nilai probabilitas 0.1078 atau  $> 0.05$  dengan nilai koefisien  $0,017937$  yang berarti krisis tidak menunjukkan pengaruh signifikan dan bersifat positif terhadap Indeks Pembangunan manusia baik di negara OKI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa krisis tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Negara OKI periode 2006-2021.

Krisis keuangan dalam banyak kasus sering didahului oleh ledakan aset dan kredit yang pada akhirnya berubah menjadi letusan. Banyak teori yang berfokus pada sumber krisis telah mengakui pentingnya ledakan di pasar aset dan kredit. Namun, menjelaskan mengapa gelembung harga aset atau ledakan kredit dibiarkan berlanjut dan akhirnya menjadi tidak berkelanjutan dan berubah menjadi kegagalan atau krisis telah menjadi tantangan. Ini tentu saja membutuhkan jawaban mengapa pelaku pasar keuangan maupun pembuat kebijakan tidak dapat memperkirakan risiko dan berupaya memperlambat ekspansi kredit dan kenaikan harga aset (Claessens dan Kose, 2012). Namun begitu, apabila ditelisik lebih jauh, krisis setidaknya bisa diprediksi oleh tiga hal yakni kenaikan harga aset, peningkatan kredit, dan pengaruh kenaikan harga aset serta peningkatan kredit.

Kenaikan tajam dalam harga aset, kadang-kadang disebut gelembung. Gelembung, suatu bentuk penyimpangan yang ekstrem, dapat didefinisikan sebagai "bagian dari pergerakan harga aset yang terlalu tinggi yang tidak dapat dijelaskan berdasarkan pada fundamental" (Garber, 2000). Pola kenaikan harga aset yang menggebu-gebu, sering kali diikuti oleh kehancuran, terlihat jelas pada ketidakstabilan keuangan. Model formal yang mencoba menjelaskan gelembung harga aset telah dikembangkan oleh para ahli. Beberapa model ini mempertimbangkan bagaimana perilaku rasional individu dapat menyebabkan kesalahan harga secara kolektif, yang pada gilirannya dapat menghasilkan gelembung. Lainnya bergantung pada distorsi ekonomi mikro yang menyebabkan *mispericing*. Beberapa yang lain menganggap irasionalitas pihak investor (Claessens dan Kose, 2012).

Sementara itu, peningkatan kredit yang cepat adalah benang merah lain yang mengalir melalui narasi peristiwa sebelum krisis keuangan. Pengambilan risiko yang lebih besar melalui ekspansi kredit yang cepat, bersamaan dengan kenaikan harga aset. Episode krisis lebih baru biasanya menyaksikan periode pertumbuhan yang signifikan dalam kredit (dan pembiayaan eksternal), diikuti oleh kegagalan di pasar kredit bersama dengan koreksi tajam dalam harga aset. Penjelasan ini persis dengan situasi di Amerika pada tahun 2008. Ledakan kredit dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk guncangan dan perubahan struktural di pasar. Guncangan yang dapat menyebabkan ledakan kredit mencakup perubahan produktivitas, kebijakan ekonomi, dan aliran modal. Beberapa *boom credit* cenderung dikaitkan dengan guncangan produktivitas positif. Ini biasanya dimulai selama atau setelah periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Ketika harga aset di pasar naik secara signifikan atau terjadi kredit besar-besaran dapat menyebabkan krisis, maka penyebab krisis yang ketiga ialah ketika dua hal tersebut terjadi secara bersamaan. Harga aset dan ledakan kredit ini yang pada gilirannya membuat rendahnya daya beli masyarakat sehingga masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk melakukan jual beli dan pasar berhenti, pada saat itulah krisis akan terjadi (Claessens dan Koses, 2013).

Krisis keuangan dapat terjadi dalam banyak bentuk. Reinhart dan Rogoff (2009) membedakan dua jenis krisis: Kelompok pertama terutama mencakup krisis mata uang dan berhenti mendadak dan kelompok kedua berisi krisis utang dan perbankan. Namun secara lebih lanjut, terdapat beberapa indikator untuk mengukur krisis keuangan secara lebih lanjut misalnya melalui neraca pembayaran, pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, maupun tingkat populasi.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan dari hasil penelitian melalui pengujian *Difference in Difference* (DiD), maka dapat disimpulkan bahwa variabel neraca pembayaran adalah satu-satunya variabel yang berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Adapun variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan tingkat populasi berpengaruh signifikan secara negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Selain itu, setelah dibandingkan kondisi sebelum dan sesudah krisis menunjukkan tidak ada pengaruh antara Krisis dan Indeks Pembangunan Manusia pada negara OKI periode 2006-2021. Adapun hasil koefisien determinasi adalah 0.362379, yang berarti kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen sebesar 36.2%, sementara 63.8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam studi ini.

Terdapat beberapa implikasi kebijakan yang ditawarkan dari penelitian ini. Pertama, setiap negara OKI perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara anggota. Kedua, ketahanan internal ekonomi akan mampu memberikan daya tahan lebih perekonomian pada saat krisis keuangan melanda. Ketiga, kolaborasi dan kerjasama antar negara anggota OKI perlu ditingkatkan.

## PUSTAKA ACUAN

- Arisman. (2018). Determinant of Human Development Index in ASEAN Countries. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7(1), 113-122.
- Amin, R. (2008). *Satanic Finance: True Conspiracies*. Jakarta: Ufuk PublishingHouse.
- Bassam, A.A. (2013). The Relationship Between Governance and Economic Growth During Time of Crisis. *European Journal of SustainableDevelopment*, 2(4), 1-18.
- Becherair, A., & Tahtane, M. (2017). The Causality Between Corruption and Human Development in MENA Countries: A Panel Data Analysis. *Journal of Economics and Business*, 20(2), 63-84.
- Bosede, A., Adagunodo, M., & Bola, S. (2014). Climate Change, Human Development and Economic Growth in Nigeria. *International Journal of Humanities and Social Science*, 4, 222-228.
- Case, K., & Fair, R.C. (2006). *The Principles of Economy*. Edisi kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Claessens, S., & Kose, A.M. (2013). Financial Crises: Explanations, Types, and Implications. *IMF Working Paper*. WP/13/28.
- Drezner, D. W., & McNamara, K. (2013). International Political Economy, Global Financial Orders and the 2008 Financial Crisis. *Perspectives on Politics*, 11, 155-166.
- Fredriksson, A., & Gustavo M. O. (2019). Impact Evaluation Using Difference-in-Difference. *RAUSP Management Journal*, 54(4), 519-532.
- Hamidi, L. (2012). *The Crisis: Krisis Manalagi yang Kau Dustakan?*. Jakarta: Republika.
- Kemenkeu. (2009). *Peranan Perekonomian Indonesia terhadap Ketidakseimbangan Global*. Jakarta: Kemenkeu.
- Kieu, V. T. T., & Tien, L. T. (2022). Determinants of Variation in Human Development Index Before and After the Financial Crisis: A Bayesian Analysis for Panel Data Model. In: Ngoc Thach, N., Ha, D. T., Trung, N. D., & Kreinovich, V (eds). *Prediction and Causality in Econometrics and Related Topics*. Studies in Computational Intelligence (Vol. 983, pp. 586–608). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-77094-5\\_45](https://doi.org/10.1007/978-3-030-77094-5_45)
- Khodabakhshi, A. (2011). Relationship between GDP and Human Development Indices in India. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 2(3), 251-253.
- Kim, D., & Kusharjanto, H. (2011). Infrastructure and Human Development: The Case of Java, Indonesia. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 16(1), 111-124.
- Mankiw, G. (2006). *Macroeconomics*. Edisi keenam. Jakarta: Erlangga.
- Paliova, I., McNown, R., & Nulle, G. (2019). Multiple Dimensions of Human Development Index and Public Social Spending for Sustainable Development. *IMF WORKING Paper*. WP/19/204.
- Peet, R., & Hartwick, E. (2015). *The Theoris of Development: Contentions, Argument, Alternatives*. Third Edition. New York: The Guilford Press.
- Sen, K. (2011). 'A Hard Rain's a-Gonna Fall': The Global Financial Crisis and Developing Countries. *New Political Economy*, 16(3), 399-413.
- Shah, S. (2016). Determinants of Human Development Index: A Cross-Country Empirical Analysis. *MPRA Paper*. No73759.

- Sihono, T. (2008). Krisis Finansial Amerika Serikat dan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 5(2), 171-192.
- Sugema, I. (2012). Krisis Keuangan Global 2008-2009 dan Implikasinya pada Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 17(3), 145-152.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyowati, N., Sinaga, B.M., & Novindra. (2017). Impacts of Government and Household Expenditure on Human Development Index. *Jejak: Journal Economics and Policy*, 10(2), 412-428.
- Todaro, M., & Smith, S. (2012). *Economic Development*. Eleventh Edition. New York: Pearson.
- Yolanda. (2017). Analysis of factors Affecting Inflation and Its Impact on Human Development Index and Poverty in Indonesia. *European Research Studies Journal*, 20(4B), 38-56.